

**KEKUATAN PEMBUKTIAN UNSUR TANPA HAK MELAWAN HUKUM
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PASAL 132 UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

WAWAN DODDY IRAWAN

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan pembuktian atas unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meliputi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Dan untuk mengetahui isi atau muatan yang terkandung dalam dakwaan primair penuntut umum atas terdakwa Muhammad Ridho Irama, khususnya berkaitan dengan terpenuhinya salah satu unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menolak dakwaan primair yang didakwakan penuntut umum kepada Muhammad Ridho Irama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian dan teori keadilan yang berkenaan dengan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian yang menggunakan bahan atau data sekunder yaitu bahan data pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, sedangkan bahan sekunder terdiri dari abstrak, dokumen resmi dan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuatan pembuktian perbuatan melawan hukum yang termuat dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Muhammad Ridho Irama tidak dapat dipenuhi dalam putusan hakim dengan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan barang bukti shabu kurang dari 1 gram hanya dapat didakwa pada unsur Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Narkotika.' Unsur-unsur melawan hukum pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika tidak dapat dipenuhi dalam dakwaan primair atas terdakwa Muhammad Ridho Irama dikarenakan atas pertimbangan keterangan dari saksi ahli dengan berdasarkan pada SEMA RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tertanggal 7 April 2010, telah menegaskan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf a dan bahwa UU. No. 35 Tahun 2009 oleh karena unsur Pasal 127 ayat (1)a UU.RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dipertimbangkan di atas telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Subsider. Pertimbangan hakim menolak dakwaan primair penuntut umum atas terdakwa Muhammad Ridho Irama adalah Terdakwa Muhammad Ridho bin H. Rhoma Irama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer.

**STRENGTHS OF EVIDENCE OF ELEMENTS WITHOUT RIGHTS AGAINST
LAW IN HANDLING CRIMINAL ACTS ARTICLE 132 LAW NUMBER 39 OF
2009 ON NARCOTICS**

WAWAN DODDY IRAWAN

ABSTRACT

This research was conducted to determine the strength of proof of the element of lawlessness in Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which includes the element of possessing, storing, controlling, or providing class I narcotics instead of plants. And to find out the contents or contents contained in the primary charges of the public prosecutor on the defendant Muhammad Ridho Irama, specifically related to the fulfillment of one element of lawlessness in Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and to know and analyze the judges' basis in rejecting the primary charges indicted by the public prosecutor to Muhammad Ridho Irama.

The theory used in this study is the theory of proof and the theory of justice with regard to the belief of judges in deciding cases of narcotics crimes.

The research method used in this thesis is a normative research method. Research that uses secondary material or data is library data material that contains information about primary legal materials, while secondary material consists of abstracts, official documents and judges' decisions that have permanent legal force and tertiary legal material.

The results of this study conclude that the power of proof of an offense contained in Article 112 of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics in criminal cases in cases of narcotics abuse with defendant Muhammad Ridho Irama cannot be fulfilled in a judge's decision by conducting an experiment or conspiracy to do criminal offenses without rights or against the law have, control or provide Narcotics Group I not plants with evidence of methamphetamine less than 1 gram can only be charged on the element Article 127 paragraph (1) a Narcotics Law. 'Elements against the law in Article 112 The Narcotics Act cannot be fulfilled in the primary indictment of the defendant Muhammad Ridho Irama due to consideration of the testimony of expert witnesses based on RI SEMA No. 04 of 2010 concerning the Placement of Misuse of Narcotics Addicts and Abuse in the Institute for Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation, dated April 7, 2010, has confirmed that the application of criminal prosecution as referred to in Article 103 letter a and that of the Act. No. 35 of 2009 because of the elements of Article 127 paragraph (1) a UU No. RI No. 35 of 2009 as considered above has been fulfilled in the actions of the Defendant, the Assembly is of the opinion that the Defendant has been proven by law to carry out criminal acts as a Subsidiary Charges. The judge's consideration of rejecting the primary charges of the public prosecutor for the defendant Muhammad Ridho Irama was that the defendant Muhammad Ridho bin H. Rhoma Irama was not proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act in the Primary indictment and released the Defendant from the Primary charge.